

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pangden, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara

Naomi Pongka'pan ^{1*}, Putriana Kristanti ²

^{1,2} Universitas Kristen Duta Wacana, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Email: 12210659@students.ukdw.ac.id ^{1*}, putrianak@staff.ukdw.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 3 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 30 Juni 2025; Diterima 10 Juli 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Pongka'pan, N., & Kristanti, P. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pangden, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2497-2503. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4421>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pangden, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang disebarakan kepada partisipan. Instrument pengukuran menggunakan skala Likert, melalui uji validitas, reliabilitas dan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS 4. Partisipan penelitian ini berjumlah 144 orang penerima manfaat PKH yang dipilih secara total sampling yaitu setiap individu dalam populasi dijadikan sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pangden, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kesejahteraan Masyarakat; Program Harapan Keluarga; Transparansi.

Abstract

This study aims to examine the effect of transparency, accountability, and the Family Hope Programme on community welfare in Pangden Village, Tikala Sub-district, North Toraja Regency. The method used is a quantitative approach with data collection through the distribution of questionnaires distributed to participants. The measurement instrument uses a Likert scale, through validity, reliability and hypothesis testing conducted using SmartPLS 4 software. The participants of this study were 144 PKH beneficiaries selected by total sampling, namely each individual in the population was sampled. The results of the analysis show that the variables of transparency and accountability have a significant and positive influence on community welfare in Pangden Village, Tikala Subdistrict, North Toraja Regency.

Keyword: Accountability; Community Welfare; Family Hope Program; Transparency.

1. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator penentu keberhasilan suatu negara dalam membina mutu hidup yang baik bagi warga negaranya. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, termasuk Indonesia. Program Keluarga Harapan atau bisa disingkat PKH, merupakan upaya yang diusulkan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan sebagai bagian dari berbagai upaya dukungan sosial. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan serta memperbaiki mutu sumber daya manusia. Saat ini, PKH telah berkembang menjadi instrumen utama bagi berbagai inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dana yang disisihkan untuk PKH berperan penting dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkannya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Tujuan dukungan PKH adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan mendistribusikan dana kepada rumah tangga yang kurang mampu, yang dimaksudkan untuk memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah memperoleh layanan pendidikan dan perawatan kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup mereka. Meskipun demikian, berbagai elemen dapat mempengaruhi keberhasilan dan dampak program selama pelaksanaannya, di antaranya transparansi dan akuntabilitas yang penting. Tanpa adanya transparansi yang baik dalam pengelolaan dana dan akuntabilitas yang jelas terhadap penggunaan bantuan, tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat. Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji sejauh mana pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PKH terhadap kesejahteraan Masyarakat (Koordinator *et al.*, n.d.) Keberhasilan saat menyalurkan PKH dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam menerapkan suatu prinsip Good Governance (Pemerintahan yang baik). Sektor swasta dan masyarakat harus bekerja sama secara positif dan sinergis, menurut UNDP (United Nations Development Programme). Suatu pemerintahan yang menciptakan dan mengamalkan nilai-nilai keahlian, akuntabilitas, keterbukaan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, dan kemanjuran supremasi hukum dianggap menjalankan pemerintahan yang baik. Administrasi yang baik, secara umum, hanya itu pemerintahan yang baik. Definisi "baik" konsisten dengan ide dasar administrasi yang baik (Fitri *et al.*, 2023).

Di Desa Pangden sendiri, kesejahteraan masyarakat dalam aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan masih perlu diperhatikan. Dalam aspek pendidikan, meskipun bantuan PKH mendorong anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah untuk melanjutkan pendidikan di desa, namun masih dibatasi oleh fasilitas yang belum memadai, seperti ruang kelas yang tidak mencukupi atau kurangnya guru yang berkualifikasi. Ini berimbas pada rendahnya tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Desa Pangden, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka agar dapat menjangkau kesempatan kerja yang lebih menguntungkan di masa depan. Di bidang kesehatan, meskipun PKH turut mendukung pemeriksaan kesehatan bagi keluarga miskin, akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak dan tenaga medis yang cukup masih menjadi masalah. Puskesmas yang ada mungkin belum memiliki peralatan yang memadai atau pelayanan kesehatan yang optimal, yang membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak khususnya di wilayah terpencil. Sementara itu, dalam hal perumahan, masih banyak rumah di Desa Pangden yang belum memenuhi standar kelayakan, dengan fasilitas sanitasi yang buruk dan kualitas bangunan yang tidak tahan terhadap cuaca ekstrem. Program bantuan rumah dari pemerintah, seperti Program Rumah Swadaya atau bantuan lainnya, meskipun ada, tidak selalu cukup untuk mencakup seluruh keluarga yang membutuhkan. Hal ini berisiko memperburuk kondisi kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang menetap di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik di Desa Pangden, perlu ada perhatian lebih pada perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan penyediaan perumahan yang layak. Program-program seperti PKH seharusnya dipadukan dengan upaya untuk memperbaiki akses terhadap layanan yang lebih berkualitas, guna menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan *Agency theory* atau teori keagenan menjelaskan keterkaitan antara dua entitas, pihak prinsipal dan agen. Dalam hal ini, pihak berwenang memperbolehkan perwakilan untuk bertindak atas nama dirinya. Premis utama teori ini

RESEARCH ARTICLE

adalah bahwa agen tidak secara konsisten bertindak dengan cara yang sejalan dengan kepentingan prinsipal. karena agen cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi. Sementara itu, principal memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan atau kontrolnya. Oleh karena itu, teori keagenan memandang organisasi sebagai serangkaian kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini, hubungan antara principal dan agent seharusnya didasari oleh kesepakatan yang mengatur hak dan tanggung jawab dari tiap-tiap pihak, termasuk kewajiban agent untuk bertindak sesuai kepentingan principal dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Pada PKH hubungan keagenan antara pemerintah dan rakyat terdapat pada pemerintah sebagai agen menunjukkan kepedulian melalui menyalurkan bantuan suatu program yaitu PKH kepada masyarakat sebagai prinsipal yang menerima bantuan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yakni melalui proses pengumpulan data yang direpresentasikan secara numerik dan dianalisa dengan perangkat lunak SmartPLS 4. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel (total sampling). *Total sampling* mengacu pada teknik yang mencakup keseluruhan populasi sebagaimana yang dijelaskan oleh (Sugiono, n.d.) Alasan pemilihan total sampling dalam penelitian ini adalah karena populasi berjumlah 144 orang yang cukup terjangkau. Dengan demikian, besar sampel dalam penelitian ini setara dengan seluruh populasi, yaitu sebanyak 144 orang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Model Pengukuran (*Measurement Model / Outer Model*)

Penilaian terhadap model pengukuran bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang dipakai memiliki validitas dan reliabilitas dalam merepresentasikan konstruk yang dimaksud. Prosedur yang terlibat dalam pengujian model ini meliputi:

1) Uji Validitas (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen dinilai dengan loading factor yang ada antara indikator dan konstruk laten yang mendasarinya. Suatu indikator dianggap memiliki validitas konvergen ketika nilai loading factor di atas 0,60, yang menandakan bahwa indikator tersebut secara andal mengukur konstruk yang dimaksud.

Tabel 1. Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer loading	Keterangan
Transparansi (X1)	X1.1	0,717	Valid
	X1.2	0,876	Valid
	X1.3	0,797	Valid
	X1.4	0,820	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,839	Valid
	X2.2	0,822	Valid
	X2.3	0,800	Valid
	X2.4	0,814	Valid
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Y.1	0,720	Valid
	Y.2	0,720	Valid
	Y.3	0,709	Valid
	Y.4	0,739	Valid

RESEARCH ARTICLE

Hasil analisis SmartPLS 4 yang disajikan pada tabel 1, sebagian besar indikator yang bersesuaian dengan masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai outer loading yang melebihi 0,7, yang menandakan bahwa indikator tersebut dinilai valid.

2) Uji Validitas (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan mengukur sejauh mana suatu konstruk berbeda dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lainnya. Evaluasi dilakukan melalui dua metode, salah satunya adalah cross loading, yang mengharuskan indikator memperlihatkan nilai loading yang lebih besar pada konstruk yang diukur dibandingkan pada konstruk lainnya. Selain itu, menurut kriteria Fornell-Larcker, nilai kuadrat dari AVE (Average Variance Extracted) untuk setiap konstruk seharusnya melebihi nilai korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lain. Ini menunjukkan bahwa konstruk memiliki kemampuan diskriminatif yang kuat.

Tabel 2. Nilai Cross Loading

Variabel	Transparansi	Akuntabilitas	Kesejahteraan Masyarakat
X1.1	0,717	0,470	0,350
X1.2	0,876	0,509	0,466
X1.3	0,797	0,518	0,395
X1.4	0,820	0,598	0,484
X2.1	0,505	0,839	0,571
X2.2	0,566	0,822	0,517
X2.3	0,515	0,800	0,516
X2.4	0,560	0,814	0,502
Y.1	0,490	0,449	0,720
Y.2	0,439	0,450	0,720
Y.3	0,325	0,475	0,709
Y.4	0,275	0,487	0,739

Berdasarkan temuan *cross loading* yang diilustrasikan pada tabel 2, setiap indikator dalam setiap variabel penelitian menampilkan nilai loading yang lebih tinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Ini mengindikasikan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas diskriminan yang memuaskan, di mana setiap indikator dapat merepresentasikan variabelnya secara lebih efektif dibandingkan dengan variabel lainnya.

Tabel 3. Nilai Average Variance Extracted, Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Transparansi (X1)	0,818	0,832	0,879	0,647
Akuntabilitas (X2)	0,836	0,839	0,891	0,671
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,694	0,694	0,813	0,521

Berdasarkan hasil temuan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* yang tercantum dalam Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memperoleh nilai di atas 0,60. Ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian ini terbukti memiliki konsistensi dan stabilitas yang memadai. Oleh karena itu, setiap konstruk atau variabel yang digunakan dianggap valid, dan pernyataan pengukuran pada setiap variabel menunjukkan tingkat reliabilitas yang memenuhi kriteria yang dapat diterima.

RESEARCH ARTICLE

3.1.2 Uji path Coefficient (R-Square)

Statistik R-square menunjukkan proporsi variasi dalam variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R-square sebesar 0,67 menunjukkan kemampuan prediktif yang kuat, sementara 0,33 menyatakan tingkat sedang, dan 0,19 menyatakan tingkat rendah. Untuk mengevaluasi stabilitas model relatif terhadap jumlah prediktor, nilai R-square yang disesuaikan digunakan.

Tabel 4. Nilai Uji R-Square

	R-square adjusted
Kesejahteraan Masyarakat	0,429

Berdasarkan hasil temuan pada tabel 4, diatas nilai R-square adjusted yang dimodifikasi sebesar 0,429 menunjukkan bahwa variable bebas, yaitu transparansi dan akuntabilitas dapat menjelaskan 42,9% variasi Kesejahteraan Masyarakat, sisanya 57,1% dijelaskan oleh variabel lain yang belum termasuk dalam model.

3.1.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Dalam pengujian hipotesis (*bootstrapping*), analisis dilakukan untuk mengidentifikasi apakah variabel independen berdampak signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan nilai koefisien jalur (*path coefficient*) yang menggambarkan besarnya parameter beserta nilai signifikansi berdasarkan statistik t. Tingkat signifikansi parameter ini memberikan pemahaman tentang keterkaitan antar variabel dalam penelitian. Batas ambang untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis ditentukan pada tingkat probabilitas 0,05.

Tabel 5. Uji Hipotesis Bootstrapping

		Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	t statistics (O/STDEV)	P values
Transparansi	->	0,194	0,195	0,103	1,882	0,060
Kesejahteraan Masyarakat						
Akuntabilitas	->	0,517	0,528	0,093	5,536	0,000
Kesejahteraan Masyarakat						

Berdasarkan tabel 5, hasil evaluasi hipotesis menunjukkan bahwa t-statistik untuk variabel transparansi adalah 1,882, dengan nilai-p sebesar 0,060. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki dampak statistik yang signifikan pada ambang signifikansi 10%. Sebaliknya, t-statistik untuk variabel akuntabilitas tercatat sebesar 5,536, disertai dengan nilai-p yang sangat rendah sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa dampak faktor akuntabilitas signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

3.2 Pembahasan

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis 1 diketahui transparansi bahwa koefisien jalur menunjukkan nilai sebesar 0,194 dengan P-value sebesar 0,060 serta t-statistik sebesar 1,882, dengan demikian rule of thumb analisis PLS-SEM, nilai t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05 menunjukkan bahwa dimana pengaruh tersebut dianggap signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%. Dengan demikian, transparansi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pangden. Hasil pengujian statistik hipotesis 2, diketahui akuntabilitas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai path coefficient 0,517, nilai t-statistik 5,536, dengan P-value 0,000. Dengan demikian temuan tersebut menunjukkan akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pangden.

RESEARCH ARTICLE

Artinya semakin tinggi akuntabilitas, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Pangden.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam Program Keluarga Harapan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pangden. Transparansi yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap setiap data program, akuntabilitas yang tercermin dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana program, sehingga mampu mendorong efektivitas penyaluran bantuan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Program Keluarga Harapan oleh pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PKH di Desa Pangden, maka semakin besar pula kontribusinya dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

5. Referensi

- Abdul Majid, & Zaerudin. (2023). Transparansi pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(1), 164–175.
- Albugis, F. F. (2016). Pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah untuk mewujudkan kejelasan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3).
- Damayanti, R. A., Ekonomi, F., & Makassar, U. (N.D.). Interaksi Antar Instansi Pemerintah Daerah Terkait Penganggaran (Ratna Ayu Damayanti) Keterkaitan Antar Instansi Pemerintah Daerah dalam Konteks Anggaran: *Rencana Rekonstruksi*
- Daud, M., & Marini, Y. (N.D.). elaksanakan Program Keluarga Harapan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Tidak Mampu.
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bireuen. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Fitri, N., Sellang, K., & Lukman. (2023a). Penerapan standar transparansi untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lalebata, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 11(1).
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas FEKON*, 279–283.
- Hidayatulloh, A. N. (n.d.). Peningkatan standar hidup keluarga penerima manfaat dalam evaluasi Program Keluarga Harapan: Analisis empiris dampaknya terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup penerima manfaat. *MIPKS*, 43(2). <https://doi.org/10.31105/mipks.v43i2.2142>.
- Khoerunisa, F., Ansori, A., & Widiastuti, N. (2023). Dampak Inisiatif Bantuan terhadap Peningkatan Kesejahteraan di Desa Cisero. *Jurnal Komunikasi-Edu*, 6(2).

RESEARCH ARTICLE

Koordinator Perekonomian Bappenas & Komite Nasional Governansi. (n.d.). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI): Draf 26 Desember 2021*.

Majid, A., & Zaerudin. (2023). Transparansi dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(1), 164–175.

Nurul Fitri, Sellang, K., & Lukman. (2023). Penerapan kriteria transparansi untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lalebata, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 11(1).

Riska, N. Y. Y., & Jurana. (2022). Evaluasi transparansi pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(1).

Romzek, B. S., & Ingraham, P. W. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>.